



ပိတောက်ပူပူပိတောက်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

သိက္ခာရိ ဝိသေသနာရိ ဝိသေသနာရိ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ရေကန်ပူပူပိတောက် - ဝိသေသနာရိ (ပိတောက်)

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR - BALI (80234)

ရေကန်ပူပူပိတောက် (ပိတောက်) ပိတောက်

TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: [www.diskelkan.baliprov.go.id](http://www.diskelkan.baliprov.go.id) EMAIL: [diskelkan@baliprov.go.id](mailto:diskelkan@baliprov.go.id)

Bali, 22 Februari 2024

Yth. 1. Inspektur Daerah  
Provinsi Bali  
2. Kepala Biro Organisasi  
Setda Provinsi Bali  
di –  
Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.22.523.1/488/Sekret/Diskelkan

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor B.43.061/6547/RBAK/B.ORG Hal : Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan data dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran surat ini. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670714 199403 1 003



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2023



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2023



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti dan Angayu Bagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 merupakan kewajiban sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali pada tahun-tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini diharapkan dapat menjadi parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Untuk itu besar harapan kami untuk mendapat masukan, saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk dapat lebih menyempurnakan Laporan ini .

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dalam proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**Ir. Putu Sumardiana, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670714 199403 1 003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	1
1.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis .....	3
1.4 Landasan Hukum .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Visi.....	7
2.2 Misi .....	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	7
2.4 Perjanjian Kinerja.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	9
3.2 Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB IV PENUTUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip Money Follow Function diubah menjadi Money Follow Program serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya, Pemberdayaan masyarakat, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), dan Penggalian potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

#### 1.2 Struktur Organisasi & Tata Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di bentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- 3) Bidang Kelautan, membawahi:
  - a. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
  - b. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - c. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
- 4) Bidang Perikanan, membawahi:
  - a. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
  - b. Unit Substansi Perikanan Budidaya; dan
  - c. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
  - a. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
  - b. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - c. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
- 6) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
  - a. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
  - b. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
  - c. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 7) Jabatan Fungsional; dan
- 8) UPTD
  - a. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD PPMHP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD PPMHP terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
    - i. Sub Bagian Tata Usaha;
    - ii. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
    - iii. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
    - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air



Payau/Laut merupakan unsur pelaksana kegiatan pembenihan berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :

- i. Sub Bagian Tata Usaha;
  - ii. Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut;
  - iii. Seksi Produksi Budidaya Air Tawar; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Bali dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali merupakan unsur pelaksana teknis berdasarkan program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
- i. Sub Bagian Tata Usaha;
  - ii. Seksi Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
  - iii. Seksi Pengawasan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan; dan
  - iv. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD Pelabuhan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis program Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri dari : Kepala UPTD, membawahi :
- i. Sub Bagian Tata Usaha;
  - ii. Seksi Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran;
  - iii. Seksi Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha; dan
  - iv. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan



Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumberdaya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumberdaya dapat pulih (Renewable resources), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (Non renewable resources), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan ( Environmental services).

Sumberdaya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih diantaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumberdaya energi kelautan terdiri dari : OTEC ( Ocean Thermal Energy Conversion), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum optimal dan dihadapkan pada beberapa isu-isu strategis yaitu:

- 1) Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
- 2) Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan;
- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
- 4) Menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir dan laut; dan
- 5) Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya;
- 2) Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 3) Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
- 4) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
- 5) Penggalan potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas / mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian





sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah, gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya.

#### 1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 9) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80);
- 10) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- 11) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Visi

“Nangun Sad Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Panjcasila 1 Juni 1945.

## 2.2. Misi

Dari Ke-22 (duapuluh dua) Misi RPJMD Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali secara khusus menunjang tercapainya Misi ke-1, Misi ke-2 dan Misi ke-3 yaitu sebagai berikut :

1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali;
2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian Serta Meningkatkan Kesejahteran Petani;
3. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih.

## 2.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dari ketiga Misi yang disampaikan di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menurunkan Misi tersebut menjadi Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang diuraikan sesuai target Rencana Strategis yaitu selama 5 tahun sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Terwujudnya SentraSentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	0	121.713,44 Ton	124,147.71 ton	126,630.66 ton
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	0	0	25,516,85 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton
3	Meningkatnya kualitas tata kehidupan	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	0	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi							

Indikator dari Sasaran Strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk meningkatkan Produksi sebagai acuan dalam menentukan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan peningkatan teknologi, kemudian meningkatkan ekspor sebagai acuan pangsa pasar produk perikanan yang terserap pasar Internasional telah memenuhi standar-standar yang menunjukkan produk perikanan bermutu baik dan permintaan pasar terhadap produk dalam negeri, serta jumlah ruang laut yang dimanfaatkan sebagai acuan bahwa ruang laut sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk keberlanjutan.

Kemudian dari Tabel di atas dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun pada Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Terwujudnya SentraSentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	Ton	126,630.66
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	Ton	28.166,57
3	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	Kawasan	5

#### 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang ditanda tangani oleh Bapak Gubernur Bali dan Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yaitu sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP OPD	80 Nilai
Terwujudnya Sentra- Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	126,630.66 ton
Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	28.166,57 ton
Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	5 Kawasan



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali jika dibandingkan antara capaian pada tahun 2022 dengan capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya SentraSentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	124.147,71 ton	130.577,128 ton	105,18	126.630,66 ton	139.595,58 ton	110,24
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah eksport produk perikanan	26.825,31 ton	27.151,635 ton	101,22	28.166,57 ton	21.670,686 ton	76,93
3	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	4 Kawasan	4 Kawasan	100	5 Kawasan	5 Kawasan	100

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Produksi Perikanan dimana capaian realisasi pada Tahun 2023 lebih besar dari capaian realisasi pada Tahun 2022 dimana dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya dimana dapat menjadi acuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk jumlah ekspor mengalami penurunan dimana capaian realisasi pada Tahun 2023 lebih kecil dari capaian realisasi pada Tahun 2022 hal ini dikarenakan menurunnya permintaan pasar dari luar negeri dan upaya yang dilakukan adalah meningkatkan konsumsi ikan di dalam negeri agar produksi perikanan yang telah meningkat dapat terserap oleh pasar. Sedangkan kawasan ruang laut yang dimanfaatkan telah mencapai target yang diharapkan seiring dengan ditetapkannya Kawasan Konservasi Jembrana sebagai Kawasan Konservasi ke 5 di perairan Bali.

Untuk mengamati capaian selama 5 tahun kebelakang dari ketiga sasaran di atas dapat diamati pada tabel berikut:



Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Sentra Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	0	0	121.713,44 Ton	124.147,71 ton	126.630,66 ton	0	0	120.798,50 ton	130.577,13 ton	139.595,58 ton
Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	0	0	25.516,85 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton	0	0	26.825,305 ton	27.151,635 ton	21.670,686 ton
Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	0	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	0	0	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa terdapat review terhadap Renstra dimana terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga Target dan Capaian dapat diamati dari Tahun 2021. Dari ketiga indikator kinerja di atas capaian realisasi pada Jumlah ekspor mengalami fluktuasi sesuai dengan permintaan pasar luar negeri. Dengan demikian upaya yang dilakukan adalah meningkatkan konsumsi ikan di dalam negeri agar produksi perikanan yang telah meningkat dapat terserap oleh pasar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Sentra Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	126.630,66 ton	139.595,58 ton	110,24	Pencapaian realisasi melampaui target	Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan teknologi untuk meningkatkan produksi perikanan pada pelaku usaha perikanan
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	28.166,57 ton	21.670,68 ton	76,93	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Jumlah ekspor mengalami fluktuasi sesuai dengan permintaan pasar luar negeri. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan konsumsi ikan di dalam negeri agar semua produksi terserap pasar melalui kegiatan Gemarikan.
3	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	5 Kawasan	5 Kawasan	100	Pencapaian realisasi mencapai target	Upaya yang dilaksanakan adalah menyusun penetapan Kawasan Konservasi Perairan, melaksanakan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang mengalami kerusakan serta melaksanakan pengawasan dan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							monitoring sumberdaya pada kawasan konservasi perairan.

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun tidak semua realisasinya mencapai 100%. Permasalahan yang terjadi juga dapat ditangani seperti pada solusi yang dijelaskan pada tabel di atas. Sedangkan untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:

No	Tujuan/ Saaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Terwujudnya SentraSentra Produksi Perikanan	126.630,66 ton	139.595,58 ton	110,24	1.536.000.092	1.435.555.654	93,46	6,54
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	28.166,57 ton	21.670,686 ton	76,93	399.961.792	348.839.352	87,21	12,79
3	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	5 Kawasan	5 Kawasan	100	2.560.296.592	2.434.212.495	95,07	4,93

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat mencapai realisasi anggaran rata-rata 87% sampai 95%. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang
1	Terwujudnya SentraSentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang dihasilkan	110,24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	100,10	Menunjang
					Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	400	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	222,20	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPIB dan keamanan keselamatan nelayan	100	Menunjang
	Sub Kegiatan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	50	Menunjang			



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	166,42	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Induk Ikan Unggul	212,60	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsidan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah benih, calon induk dan induk	155,40	Menunjang
2	Meningkatkan daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	76,93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERIKANAN	Jumlah produk perikanan bersertifikat	125,00	Menunjang
					Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan	74,40	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang Menerapkan Persyaratan Sertifikasi SNI	202,70	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	236,70	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutudan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Sain	128,60	Menunjang
3	Meningkatkan pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	100	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIRDAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	150	Menunjang
					Jumlah Kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya	100	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Fasilitasi pendampingan peningkatan produksi petani garam	100	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	99,70	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari PemerintahPusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	99,70	Menunjang





Terdapat 4 (empat) Program yang menunjang Capaian Kinerja tersebut. Pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan terdapat 2 (dua) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pada Indikator Kinerja Jumlah ekspor produk perikanan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Pada Indikator Kinerja Jumlah pemanfaatan ruang laut terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain ketiga program di atas, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diamati pada tabel berikut:

No	Program	Kegiatan/Sub Keegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,689,600	15,094,100	76.66
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,350,000	1,324,500	98.11
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,350,000	0	0.00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,350,000	0	0.00
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,350,000	0	0.00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,955,500	4,756,750	31.81
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,971,643,714	18,598,034,336	98.03
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,000,000	37,562,000	75.10
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	582,572,968	557,800,594	95.70
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	814,880,407	801,157,231	98.31
11	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	79,131,792	79,029,092	99.87
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil / Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,225,001,292	1,197,817,442	97.78
13	PROGRAM	Pengawasan Sumber Daya Kelautan	160,220,000	18,000,000	11.23



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	dan Perikanan sampai dengan 12 Mil / Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12			
14	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil / Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18,101,400	18,000,000	99.43
15	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar / Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	125,051,792	116,556,792	93.21
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,302,800	30,872,000	89.99
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152,486,792	127,399,192	83.54
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	430,868,064	394,368,276	91.52
19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut / Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234,998,800	224,128,000	95.37
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,851,300	34,797,800	94.42
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,426,792	108,057,292	87.54
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	481,147,642	372,032,440	77.32
23	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar / Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2,430,744,800	2,317,280,703	95.33
24	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar / Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4,500,000	375,000	8.33
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,867,600	2,624,000	91.50
26	PROGRAM PENUNJANG	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,451,400	25,912,300	69.18



No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	/Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,422,400	53,804,600	65.27
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	964,744,608	899,186,959	93.20
29	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIRDAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi / Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	320,830,000	269,810,260	84.09
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,352,000	0	0.00
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,053,500	29,650,000	82.23
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,070,400	58,172,700	93.72
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86,644,892	80,391,713	92.78
34	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi / Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76,000,000	13,610,212	17.91
TOTAL			27,668,412,255	26,487,606,284	95.73

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak direalisasikan, hal ini dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran sesuai Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Apbd Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yaitu dijelaskan bahwa untuk menghentikan kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pelaksanaan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

### 3.2. Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2023 berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi anggaran:



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.993.832.379	22.232.998.783	96,69
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	399.961.792	348.839.352	87,22
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.301.001.292	1.211.427.654	93,12
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	234.998.800	224.128.000	95,37
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.560.296.592	2.434.212.495	95,08
6	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	178.321.400	36.000.000	20,19
Total		27.668.412.255	26.487.606.284	95,73

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung Program Dinas Kelautan dan Perikanan memprioritaskan anggaran untuk program prioritas sesuai dengan program yang menunjang dari Misi Gubernur Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat mencapai realisasi anggaran 95,73%.



## BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2023 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah tiga indikator dengan capaian kinerja dua indikator sebesar 110,24% dan 100% dan satu indikator lainnya sebesar 76,93%. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan segala upaya yang telah dilakukan Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali telah EFEKTIF dalam mencapai target yang telah diteapkan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali mencapai 95,73% dengan realisasi fisik mencapai 99,64%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 4,27% tersebut merupakan hasil EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2023 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukana atas segala kemungkinankemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh untuk akselerasi capaian kinerja organisasi dimasa datang khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pegawai dan pelaksanaan diklat yang berkelanjutan agar bisa terus update atas regulasi terkait kelautan dan perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 telah kami susun untuk dapat perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih



# LAMPIRAN



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Sumardiana

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wayan Koster

Jabatan : Gubernur Bali

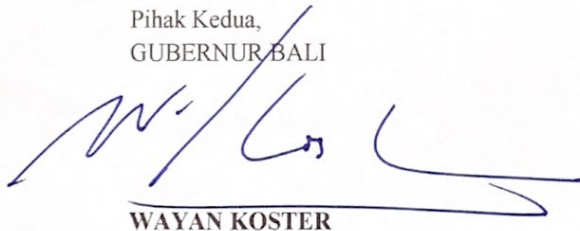
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR BALI



WAYAN KOSTER

Denpasar, 3 Januari 2023

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

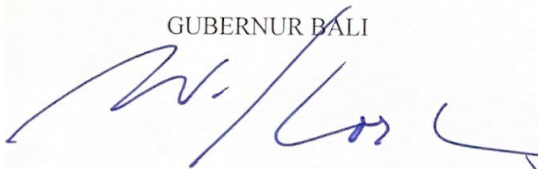


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai
Terwujudnya sentra - sentra Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan yang dihasilkan	126,630.66 ton
Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	28.166,57 ton
Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	5 Kawasan

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	23.748.122.173	PAD
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	178.952.896	PAD
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	700.822.396	PAD
4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	234.998.800	PAD
5	Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan	Rp	42.101.400	PAD
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	3.160.117.696	PAD
Total Anggaran		Rp	28.065.115.361	

GUBERNUR BALI



WAYAN KOSTER

Denpasar, 3 Januari 2023  
KEPALA DINAS



**PUTU SUMARDIANA**

NIP. 19670714 199403 1 003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE







## PEMERINTAH PROVINSI BALI

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Patimura No. 77 Denpasar 80233 Telp. (0361) 227926, Fax. (0361) 223562  
E-mail : [admin.diskelkan@baliprov.go.id](mailto:admin.diskelkan@baliprov.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Menimbang : Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER 1091M.PAN1512007, Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi vertical di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA : Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Para Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Juni 2019  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI BALI,



I. MADE SUDARSANA, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650810 199203 1 017

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Yang bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
 PERIODE 2018 - 2023

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang keautan dan perikanan

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKAOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya produksi perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Dari 116,6% pada tahun 2019 menjadi 119,2% pada tahun 2023	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap
	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap dari 99.100,75 ton pada tahun 2019 menjadi 107.269,84 ton pada tahun 2023	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Meningkatnya nilai tambah dan daya saing hasil perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Mewujudkan jumlah produksi perikanan budidaya dari 17.886,41 ton pada tahun 2019 menjadi 19.360,82 ton pada tahun 2023	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program perikanan budidaya
	Jumlah produksi garam (Ton)	Mewujudkan jumlah produksi garam dari 6.486,53 ton pada tahun 2019 menjadi 7.158,89 Ton pada tahun 2023	Bidang Kelautan	Bidang Kelautan	Program pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
	Jumlah Produksi Olahan (Ton)	Mewujudkan jumlah produksi olahan 47.113,99 ton pada tahun 2019 menjadi 50.997,67 ton pada tahun 2023	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program peningkatan nilai tambah hasil perikanan
	Jumlah Produk Perikanan Bersertifikat	Mewujudkan jumlah pelaku usaha taat hukum 75 pelaku usaha pada tahun 2019 menjadi 200 pelaku usaha pada tahun 2023	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program peningkatan nilai tambah hasil perikanan
	Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Mewujudkan tingkat konsumsi ikan 33,52 kg/perkapita/tahun pada tahun 2019 menjadi 36,28 kg/perkapita/tahun pada tahun 2023	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya, Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program peningkatan nilai tambah hasil perikanan
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	PAD Rp 650.000.000 pada tahun 2019 dan Rp 1.347.840.000 pada tahun 2023	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut  UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut  UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Program pengembangan teknologi perikanan budidaya air payau / laut Program peningkatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan



	Jumlah Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Mewujudkan kawasan konservasi perairan dari 1 kawasan pada tahun 2019 menjadi 5 kawasan pada tahun 2023	Bidang Kelautan	Bidang Kelautan	Program pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
--	---	---	-----------------	-----------------	--



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Bali

I. I Made Sudarsana, M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650810 199203 1 017



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

